

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengendalian intern merupakan suatu sistematika yang dibuat oleh suatu organisasi atau badan usaha yang tujuannya untuk mencapai cita-cita perusahaan. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik akan menciptakan keuntungan dalam suatu kegiatan usaha. Dengan adanya sistem pengendalian membuat segala aktivitas dapat dikontrol dengan baik karena sistem pengendalian intern merupakan kebijakan dan struktur sebagai tambahan terhadap pengendalian sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen dengan keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai.

Sistem pengendalian intern mempunyai tiga unsur yaitu lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian intern perusahaan. Efektifitas unsur sistem pengendalian intern sangat ditentukan oleh atmosfer yang menciptakan lingkungan pengendalian.

Menurut Boynton dkk (2003:373) pengendalian intern (internal control) didefinisikan sebagai berikut:

Suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam katagori berikut :

- 1) Keandalan laporan keuangan.
- 2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- 3) Efektivitas dan efisiensi operasi.

Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamen bahwa arahan manajemen dijalankan. Umumnya aktifitas pengendalian dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik dan pembagian tugas. Informasi salah suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu, jadi pengendalian akan berjalan dengan baik jika elemen tersebut dapat di kendalikan dengan baik pula.

Guna menghindari terjadinya penyimpangan atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam dibutuhkan pengendalian intern kredit yang mana tujuan pengendalian intern dapat menjaga pengelolaan kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan dapat mendorong efisiensi untuk mematuhi kebijakan manajemen.

Sistem dan prosedur penyaluran kredit tersebut diharapkan mampu meminimalisir setiap resiko-resiko yang ditimbulkan dari penyaluran kredit ke masyarakat. Namun, didalam prakteknya langsung tidak jarang ditemukan permasalahan dengan kredit yang diberikan ataupun kredit yang diberikan tersebut

tidak sesuai dengan harapan meskipun sistem dan prosedur penyaluran kredit yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh sebab itu di dalam manajemen perusahaan tentu menentukan sikap dan tindakan untuk menangani permasalahan tersebut. Tindakan dan sikap yang diambil perusahaan dalam menangani setiap resiko dari penyaluran kredit yang bermasalah juga harus sesuai dengan sistem dan prosedur untuk menghindari perusahaan dari resiko kerugian.

Sesuai amanat Pendirian BUMDes dilandasi oleh Pasal 213 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Bab VII Bagian Kelima mengenai BUMDes disebutkan bahwa lembaga ini berbadan hukum, yang berisi tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mewadahi aktivitas perekonomian masyarakat desa. BUMDes dengan demikian merupakan payung bagi semua kegiatan ekonomi di desa. Artinya, BUMDes dapat mewadahi semua aktivitas ekonomi desa, tanpa harus membuat bidang usaha ekonomi yang lain.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa, yang kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. BUMDes dibentuk untuk menggali potensi wirausaha yang ada di desa tersebut. Dengan dikelola oleh warga masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha, diharapkan BUMDes nantinya akan menghasilkan pendapatan asli desa yang diperoleh dari hasil perputaran usaha yang dikelola oleh BUMDes tersebut.

Dengan pendirian BUMDes ini, pembangunan desa bisa ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif, yang mencakup pembangunan infrastruktur pedesaan serta pengembangan usaha ekonomi produktif di pedesaan dan prioritas utama pendirian BUMDes ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sehingga Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa bisa terbantu dengan adanya BUMDes ini, serta meningkatkan peran desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BUMDes “Sakina Lestari” merupakan suatu usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pengurus desa yang bergerak dalam bidang pinjaman atau penyaluran dana kepada masyarakat desa guna pembentukan atau pengembangan usaha mereka baik dalam bidang perkebunan, perdagangan, perternakan maupun jasa. Penyaluran dana ini bertujuan untuk menambah modal bagi masyarakat. Sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dan dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyaluran kredit pinjaman kepada masyarakat, BUMDes “Sakina Lestari” memiliki prosedur yang harus di ikuti masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman, hal ini bertujuan mengendalikan kredit yang disalurkan kepada masyarakat, oleh karena itu dalam proses pemberian kredit dilakukan analisa terhadap pengajuan kredit oleh nasabah atau peminjam.

Prosedur pemberian kredit kepada calon peminjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sakina Lestari” adalah sebagai berikut:

Tahap pertama, calon peminjam mendatangi BUMDes “Sakina Lestari” mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis baik dengan proposal maupun isi formulir pinjaman yang disediakan oleh pihak BUMDes Sakina Lestari. Pengajuan permohonan pinjaman disertai membawa berkas-berkas atau syarat-syarat yang harus dilampirkan oleh pemohon diantaranya, fotocopy Angunan, fotocopy Kartu Keluarga (KK), pas foto ukuran 3x4 = 2 lembar, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat kuasa angunan, matrai Rp. 6000, yang diserahkan kepada staf administrasi.

Tahap kedua, dilakukan pemeriksaan oleh bagian staf administrasi BUMDes “Sakina Lestari” mengecek kelengkapan syarat-syarat yang telah dibawa oleh calon peminjam, apabila semua syarat telah lengkap maka dari itu pihak staf administrasi melakukan mengisi formulir dari calon peminjam dengan menggunakan database.

Tahap ketiga, kepala unit simpan pinjam akan memeriksa keabsahan data-data yang dilampirkan oleh calon pemohon kredit seperti kepemilikan angunan dan data-data sejak kapan usaha didirikan. Setelah persyaratan dinyatakan layak atau telah memenuhi syarat oleh kepala unit simpan pinjam bersama staf administrasi melakukan survei lapangan untuk menilai layak atau tidaknya untuk diberikan kredit dan juga menilai usaha calon peminjam tersebut, apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Dan melakukan wawancara terhadap

calon peminjam, serta mencari informasi kepada masyarakat setempat, bagaimana sifat dan waktu calon peminjam tersebut.

Tahap keempat, tahap persetujuan akan dilakukan rapat atau musyawarah desa yang dipimpin oleh direktur BUMDes “Sakina Lestari”, dihadiri oleh komisaris, pengawas, staf administrasi, staf keuangan, dan kepala unit simpan pinjam, untuk membahas hasil survey lapangan, apakah menyetujui pemberian kredit yang diajukan calon peminjam atau tidak. Jika telah disetujui maka pihak pengelola BUMDes “Sakina Lestari” mengundang pihak yang memperoleh pinjaman dana kredit untuk membicarakan hasil permohonan peminjaman kredit yang telah di ajukan, lalu membicarakan tentang besarnya dana yang akan di cairkan, cara pembayaran cicilan kredit, serta memberikan arahan dan saran-saran untuk penggunaan dana pinjaman agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga usaha yang dimiliki nasabah dapat berkembang. Setelah itu membuat legislasi dan surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) antara peminjam dengan BUMDes “Sakina Lestari”. Setelah selesai membuat surat perjanjian, direktur BUMDes “Sakina Lestari” dan peminjam menandatangani surat perjanjian pemberian kredit (SP2K).

Tahap kelima, bagian staf keuangan menyiapkan akad kredit untuk di tandatangi oleh direktur BUMDes dan peminjam. Setelah penandatanganan selesai, maka staf keuangan mencairkan dana dari rekening BUMDes “Sakina Lestari”. Peminjam dapat mengambil dana pinjaman tersebut kepada Staf keuangan. Kemudian Staf keuangan mencatat pengeluaran atas dana kredit yang telah dikeluarkan.

Setelah dana dicairkan kemudian menjadi tugas BUMDes “Sakina Lestari” untuk mengawasi bagaimana pengambilan kredit oleh peminjam.

Berikut ini adalah daftar posisi kredit yang diberikan BUMDes “Sakina Lestari” tahun 2014-2015

Table I.1
Kredit Produktif Yang Disalurkan Oleh
BUMDes Sakina Lestari Desa Kuapan Kecamatan Tambang
Periode 2014-2015

NO	Jenis Usaha	Tahun 2014		Tahun 2015	
1	Perdagangan (D)	Rp	1,248,500,000	Rp	1,418,000,000
2	Pertanian (T)	Rp	12,000,000	Rp	12,000,000
3	Perkebunan (K)	Rp	1,371,000,000	Rp	1,689,000,000
4	Perikanan (I)	Rp	56,000,000	Rp	56,000,000
5	Peternakan (Tr)	Rp	76,000,000	Rp	76,000,000
6	Jasa (J)	Rp	64,000,000	Rp	99,000,000
	Jumlah	Rp	2,827,500,000	Rp	3,350,000,000

Sumber: BUMDes Sakina Lestari

Berdasarkan table 1.1 diatas, maka dapat kita lihat bahwa permintaan pinjaman masyarakat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini meunjukkan bahwa BUMDes “Sakina Lestari” dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Peran ini akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan BUMDes “Sakina Lestari” hingga pada akhirnya dapat menjadi salah satu jembatan perkembangan ekonomi desa serta perkembangan usaha di Desa Kuapan Kecamatan Tambang khususnya dan Kabupaten Kampar umumnya.

Tabel I.2
Daftar Posisi Kredit Bermasalah
BUMDes Sakina Lestari Desa Kuapan Kecamatan Tambang
Periode 2014 – 2015

Kolektibilitas	Tahun 2014 (Rp)	%	Tahun 2015 (Rp)	%
I (0 bulan))	563,076,167	85.55	486,428,278	78.12
II (1-2 bulan)	11,786,722	1.79	17,847,667	2.87
III (3-4 bulan)	21,278,556	3.23	21,778,389	3.5
IV (5-6 bulan)	19,334,056	2.94	7,074,500	1.14
V(>6bulan)	42,694,500	6.49	89,519,167	14.38
Jumlah	658,170,001	100	622,648,001	100

Sumber: BUMDes Sakina Lestari

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat kolektibilitas kredit BUMDes Sakina Lestari pada tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Kriteria A dengan (0 bulan) atau kredit lancar pada tahun 2014 sebesar Rp. 563,076,167 dengan persentase 85.55%, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp. 486,428,278 dengan penurunan persentase menjadi 78.12%.

Kriteria B dengan (1- 2 bulan) atau kredit dalam perhatian khusus pada tahun 2014 sebesar Rp. 11,786,722 dengan persentase 1.79%, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp. 17,847,667 dengan kenaikan persentase menjadi 2.87%.

Kriteria C dengan (3-4 bulan) atau kredit kurang lancar pada tahun 2014 sebesar Rp. 21,278,556 dengan persentase 3.23%, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp. 21,778,389 dengan kenaikan persentase menjadi 3.50%.

Kriteria D dengan (5-6 bulan) atau kredit diragukan pada tahun 2014 sebesar Rp. 19,334,056 dengan persentase 2.94%, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 7,074,500 dengan penurunan persentase menjadi 1.14%.

Kriteria E dengan (>6 bulan) atau kredit macet pada tahun 2014 sebesar Rp. 42,694,500 dengan persentase 6.49%. dan tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp. 89,519,167 dengan kenaikan persentase menjadi 14.38%.

Berdasarkan pengamatan awal pada BUMDes Sakina Lestari Desa Kuapan Kecamatan Tambang terlihat adanya fenomena yang terjadi selama ini adalah kredit yang disalurkan pada BUMDes Sakina Lestari kepada nasabah mengalami masalah. Masalah tersebut diantaranya adalah ketidak tepatan waktu dalam pembayaran pokok dan bunga pinjam. Selain itu dalam pemberian kredit belum mampu mengurangi resiko kegagalan kredit.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis sangat tertarik untuk menyusun proposal ini dengan judul :

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SAKINA LESTARI DIDESA KUAPAN KECAMATAN TAMBANG.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana efektifitas

sistem pengendalian intern pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sakina Lestari Didesa Kuapan Kecamatan Tambang ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas sistem pengendalian intern pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sakina Lestari” Didesa Kuapan Kecamatan Tambang.

B. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sistem pengendalian intern yang baik dan benar terhadap pemberian kredit.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sakina Lestari Didesa Kuapan Kecamatan Tambang didalam membuat sistem pengendalian intern yang lebih baik untuk kedepannya.
- c. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datang melakukan penelitian hal yang sama dimasa yang akan datang.

D. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara garis besar batas dan luasnya penulisan, penulisan membahasnya menjadi 6 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Telahan Pustaka dan Hipotesis

Mengemukakan pengertian dan fungsi kredit, pengertian dan tujuan pengendalian intern, unsur-unsur pengendalian intern, pengendalian intern kredit dan kebijakan kredit, kriteria penggolongan kredit, penyelesaian kredit bermasalah, serta hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan

Menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, aktivitas perusahaan.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : Penutup

Terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan.